

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syariah

a. Pengertian *Baitul Mal*

Secara etimologi *baitul mal* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti rumah harta atau kas negara yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan islam untuk mengurus masalah keuangan negara, atau dalam arti lain suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan hukum syariat islam. Berdasarkan pengertian tersebut maka tujuan dibentuknya *baitul mal* dalam suatu negara karena *baitul mal* mempunyai peranan yang terbilang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum Muslimin.¹

b. Pengertian *Baitul Mal wa Tamwil*

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Mal wa Tamwil* yang berarti lembaga keuangan mikro yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah. *Baitul Mal wa Tamwil* adalah suatu lembaga yang memiliki dua istilah yakni *baitul mal* dan *baitul mal wa tamwil* lebih mengarah pada usaha penghimpunan dan

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 315.

penyaluran dana yang nonprofit seperti ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah). Sedangkan untuk *baitul mal wa tamwil* memiliki kegiatan penyaluran dana yang bersifat komersil. Aktivitas di atas merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari BMT mengingat lembaga ini berfungsi dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dengan berprinsip syariah. Lembaga ini dibangun dengan latar belakang untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat kecil menengah untuk mengembangkan usaha dan mengangkat perekonomiannya, apalagi masyarakat golongan ini hampir tidak tersentuh oleh perbankan.

Sudah bukan rahasia lagi jikalau lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini berjalan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah* (sewa menyewa) dan *wadiah* (titipan). Meskipun operasionalnya sangat mirip dengan perbankan syariah namun BMT memiliki pangsa pasar tersendiri. BMT bukanlah pesaing dari perbankan syariah melainkan pilihan baru yang diberikan untuk masyarakat. BMT merupakan pengembangan ekonomi yang berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT adalah masyarakat sekitar masjid baik itu perorangan maupun kelembagaan sepanjang alamat domisilinya dan identitasnya jelas.²

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan*, hal. 316.

c. Landasan Hukum BMT

Berikut ini ada beberapa hukum positif yang menjadi landasan kegiatan BMT adalah:

- 1) UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) UU No. 25 tahun tentang Perkoperasiaon dan,
- 3) UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).³

Adapun BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang – undangan:

- 1) Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/m.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 5) Peraturan Menteri Negaera Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman

³ Nourma Dewi, *Regulasi Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01 Februari-Juli 2017, hal. 98.

Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.⁴

Ada beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh MUI mengenai penggunaan akad – akad dalam pemberian jasa keuangan kepada masyarakat yakni:

- 1) Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- 2) Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- 3) Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 4) Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
- 5) Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.

⁴ Nourma Dewi, *Regulasi Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01, 106-107.

- 6) Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.
- 7) Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al – Ijarah al – Muntahiya bit Tamlik*.
- 8) Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *al – Qardh*.⁵

Dalam melaksanakan kegiatan operasional BMT seringkali menimbulkan berbagai masalah sebab belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga ada banyak aturan umum yang harus dipatuhi BMT. Adapun inti dari kegiatan BMT tercantum dalam surat al – Quran sebagai berikut:

QS. Al – Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ

⁵ Nourma Dewi, *Regulasi Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11, No. 01, hal. 106-107.

اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.⁶

QS. Al – Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002, hal. 47.

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁷

QS. At – Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.⁸

d. Peran BMT

Selain memiliki visi, misi dan tujuan BMT juga mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah.

Aktif dalam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini tentu dapat dilakukan melalui proses pelatihan mengenai cara – cara dalam bertransaksi yang islami, tidak curang dalam melakukan timbangan dan jujur kepada konsumen.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*....., hal. 48.

⁸ Ibid., hal. 123.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro salah satunya adalah dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha – usaha nasabah dan masyarakat umum.⁹

e. Asas BMT

Adapun dalam penerapan operasionalnya BMT memiliki asas sebagai berikut:

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsana 'amala* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai – nilai *salaam*.
- 2) *Barakah* berarti berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai spiritual).
- 4) Keadilan sosial, kesetaraan gender, nondiskriminatif.
- 5) Ramah lingkungan.
- 6) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.

⁹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan*, hal. 317-318.

- 7) Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri dan lembaga masyarakat lokal.¹⁰

Adapun BMT sendiri juga mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.¹¹

f. Prinsip Operasional BMT

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah:

- 1) Terhindar dari *maysir* (perjudian).
- 2) Terhindar dari *gharar* (penipuan).

¹⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan*, hal. 320.

¹¹ Ibid.

- 3) Terhindar dari *risywah* (suap).
- 4) Terhindar dari riba (bunga).

g. Fungsi BMT

Adapun fungsi dari BMT adalah:

- 1) Penghimpun dan penyalur dana

Dengan menyimpan dana di BMT maka uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.

- 3) Sumber pendapatan

BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

- 4) Pemberi informasi

BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

- 5) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariaah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi. BMT juga dapat memberikan kemudahan bagi mitranya dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil menengah, mikro dan koperasi tersebut.¹²

Adapun fungsi BMT di dalam masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk – produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga – lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.¹³

¹² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan*, hal. 321-322.

¹³ Ibid., hal. 322.

2. Akad dan Produk BMT

a. Akad BMT

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, hadiah, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah dan rahn.

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Pengertian akad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (*tasharruf*) dalam hukum islam. Dalam terminologi fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.¹⁴ Dalam undang – undang perbankan syariah dinyatakan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan unit usaha syariah dengan pihak lain

¹⁴ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, 2018), hal. 47

yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. seperti dalam Pasal 1 angka 13 Undang – Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam fiqh muamalah islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah sebuah janji antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak yang dilakukan antara dua belah pihak. Kedua istilah ini melibatkan dua belah pihak, namun perbedaannya jikalau *wa'ad* hanya mengikat satu pihak yakni pihak yang memberi janji yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition* – nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Dalam *wa'ad* apabila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Sementara jika dalam akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing – masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka. Dalam akad *terms and condition* – nya sudah diteatpkan secara rinci dan spesifik. Bila ada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.¹⁵

¹⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*....., hal. 48

Dalam hal ini macam – macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat, maka akad terbagi menjadi dua yaitu:

1) Akad *shahih*

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun berserta dengan syarat – syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi semua pihak – pihak yang berakad.

2) Akad tidak sah

Akad yang tidak sah dapat terjadi apabila terdapat kekurangan pada rukun ataupun syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi semua pihak – pihak yang berakad.¹⁶

Dilihat dari zatnya, maka akad dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Akad benda yang berwujud (*'ainiyah*)

Akad yang dianggap telah sah apabila benda atau objek akad tersebut telah diserahterimakan. Apabila objek akad ini tidak atau belum diserahterimakan maka akad ini dianggap keabsahannya belum sempurna.

2) Akad terhadap benda yang tidak berwujud (*ghair al – 'ainiyah*)

¹⁶ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, hal. 51-52.

Akad ini dianggap sah setelah terjadinya *sighat* (ijab qabul) sekalipun objek akadnya belum diserahkan.¹⁷

Dilihat dari segi penerimaannya para ulama fiqh membagi akad menjadi dua yaitu:

1) *Al – uqud al – musammah*

Akad yang terdapat penamaannya di dalam al – Quran dan hadits serta telah dijelaskan hukumnya seperti jual beli, sewa menyewa, *kafalah*, *hibah*, *wakalah*, *hiwalah*, *wasiat*, *rahn*, dan lain – lain.

2) *Al – uqud ghair al - musammah*

Adalah akad yang belum dinamai syara' sehingga penamaannya berdasarkan pada '*urf*, *qiyas* dan *maslahah mursalah* yang muncul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan disepanjang zaman, dibidang muamalah. Akan tetapi akhirnya menjadi bernama seperti *murabahah*, *al – istishna* dan lain – lain.¹⁸

Dilihat dari tujuannya maka dalam fiqh muamalah akad ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) Akad *Tabarru'*

¹⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, hal. 52.

¹⁸ Ibid., hal. 53

Adalah segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*) sebagai tujuan utamanya.

2) Akad Tijarah

Adalah segala macam akad yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, sehingga bersifat komersil.¹⁹

b. Produk BMT

Produk BMT pada umumnya terdiri dari dua jenis yaitu produk tabungan dan pembiayaan.

1) Produk pembiayaan

Pada umumnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT terdiri dari 3 bentuk yakni pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil, pembiayaan dengan sistem jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan.

Untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dibagi menjadi dua bentuk yakni pembiayaan 100% tanpa adanya campur tangan dari BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut dengan pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan melibatkan

¹⁹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*....., hal. 53.

BMT untuk turut serta dalam pengelolaan usaha mitranya walaupun tidak sepenuhnya, pembiayaan ini disebut dengan *musyarakah*.

Adapun pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk yakni pembelian barang untuk nasabah atau mitra dengan pembayaran yang dilunasi pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan pembiayaan *murabahah*, dan juga pembiayaan yang dilakukan dengan cara pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil atau yang biasa disebut dengan *bithaman ajil*.

Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh sebab itu pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon nasabah yang memnuhi syarat untuk menerima ZIS. Pembiayaan kebajikan ini tidak dikenai biaya apapun hanya diharuskan untuk mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan.²⁰

3. Kebijakan *Restrukturisasi*

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan

²⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan*, hal. 324-325.

serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Dalam bukunya Mustopadidjaja menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Sedangkan menurut Anderson dalam bukunya mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Mustopadidjaja memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan – ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Selanjutnya Anderson mengklasifikasikan kebijakan menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Kebijakan substantif, adalah apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah.

- 2) Kebijakan prosedural, adalah siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.²¹

Menurut Carl J. Frederick sebagaimana yang dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, sekelompok orang, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan – hambatan (kesulitan – kesulitan) dan kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.

²¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*, hal. 263-264.

- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan – harapan.
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan untuk dicapai atau sasaran tertentu baik *eksplisit* maupun *implisit*.
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- 8) Kebijakan meliputi hubungan – hubungan yang bersifat antar organisasi dan bersifat inter organisasi.
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga – lembaga pemerintah.
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dan diputuskan oleh sekelompok orang untuk mengatasi kesulitan yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengertian Restrukturisasi

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko kerugian yang terjadi pada lembaga keuangan khususnya koperasi syariah wajib menjaga kualitas dari prosedur

²² Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hal. 2-3.

pelayanan pembiayaan. Secara umum penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui berbagai upaya teknis yang bersifat preventif dan upaya lain yang bersifat represif. Bentuk upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dapat dilakukan oleh koperasi syariah dari awal sejak diterimanya pengajuan pembiayaan dari nasabah, seperti pelaksanaan analisa yang akurat yang meliputi 5C + 1S, pembuatan kontrak pembiayaan secara benar, pengikatan agunan yang dapat menjamin keselamatan pembiayaan yang diberikan serta pengawasan dan pemantauan dari praktik nasabah pembiayaan. Sedangkan untuk upaya – upaya yang bersifat represif meliputi pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah di koperasi syariah dengan menerapkan prinsip kehati – hatian.²³

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang seringkali digunakan di dalam operasional lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah – langkah yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik itu yang bank maupun non bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui penjadwalan ulang (*resecheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Terdapat beberapa regulasi dari Bank

²³ Lusriadi, *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 20.

Indonesia yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan *restrukturisasi* pembiayaan yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal *Restrukturisasi* Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.²⁴

Dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang *restrukturisasi* pembiayaan yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank maupun non bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

²⁴ Lusriadi, *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah*, hal. 20-21.

- a) Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank atau lembaga keuangan.
 - c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank maupun koperasi syariah.
 - (2) Konversi akad pembiayaan.
 - (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:
- Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap

nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.²⁵

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, *restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya dan langkah – langkah *restrukturisasi* yang dilakukan bank maupun non bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.²⁶ Adapun landasan syariah tentang upaya *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah terdapat dalam Surah Al – Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²⁷

²⁵ Lusriadi, *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah* hal. 21-22.

²⁶ Lusriadi, *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah* hal. 22-23.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*....., hal. 48.

c. Bentuk – Bentuk *Restrukturisasi* Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dari ketentuan – ketentuan Bank Indonesia *restrukturisasi* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil.
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan.
- 6) Pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

Langkah – langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi) misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur mejadi lunas.²⁸

²⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),, hal. 85.

d. Syarat – Syarat *Restrukturisasi* Pembiayaan

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 mensyaratkan *restrukturisasi* pembiayaan sebagai berikut:

- 1) *Restrukturisasi* pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- 2) *Restrukturisasi* pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*.
- 3) *Restrukturisasi* untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - b) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah *restrukturisasi*.
- 4) *Restrukturisasi* pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti – bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

- 5) *Restrukturisasi* untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 kali dan apabila lebih dari 1 kali, maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Termasuk pengertian *restrukturisasi* 1 kali adalah apabila pernah dilakukan *restrukturisasi* terhadap pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak dapat dilakukan *restrukturisasi* kembali atas pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi dalam perhatian khusus atau sebaliknya. Perbatasan *restrukturisasi* pembiayaan ini tidak berlaku untuk dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 6) *Restrukturisasi* pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan syariah non bank, dapat dilakukan terhadap masing – masing pembiayaan.
- 7) *Restrukturisasi* pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
- 8) Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* tertulis mengenai *restrukturisasi* pembiayaan termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan *restrukturisasi* atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan atau macet. Kebijaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan mana wajib disetujui oleh Komisaris

sedangkan SOP wajib disetujui oleh Direksi. Pelaksanaan kebijakan *restrukturisasi* pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Komisaris.

- 9) Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan *restrukturisasi* pembiayaan kepada Bank Indonesia.²⁹

e. Kebijakan dan Prosedur *Restrukturisasi* Pembiayaan

Kebijakan dan prosedur *restrukturisasi* pembiayaan mencakup paling kurang hal – hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan satuan kerja khusus untuk menangani *restrukturisasi* pembiayaan.
- 2) Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang *direstrukturisasi*.
- 3) Kriteria pembiayaan yang dapat *direstrukturisasi*.
- 4) Sistem dan *Standard Operating Prosedure (SOP)* *restrukturisasi* pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan *direstrukturisasi* kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil *direstrukturisasi* kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
- 5) Sistem informasi manajemen pembiayaan yang *direstrukturisasi*.

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 221.

- 6) Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non lancar (kurang lancar, diragukan dan macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan *restrukturisasi* pembiayaan dengan kolektibilitas non lancar bukan untuk masing – masing kolektibilitas dari pembiayaan non lancar.
- 7) BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur *restrukturisasi* pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati – hatian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁰

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yang berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Istilah pembiayaan yang berarti kepercayaan (*trust*) atau menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul mal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat – syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan selalu

³⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 450-451.

berkaitan dengan aktifitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis dapat diartikan sebagai segala aktifitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang. Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal yang cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain seperti bank guna bisa mendapatkan suntikan dana melalui permohonan pembiayaan.

Bisnis seringkali disebut sebagai sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang. Dengan kata lain bisnis merupakan aktifitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna mengoptimalkan keuntungan. Pembiayaan atau istilah asingnya *financing* dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Singkatnya pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan.³¹

³¹ Lusriadi, *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah*, hal. 29-30.

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank (kecuali poin ketiga) meliputi 3 jenis produk yaitu:

- 1) Produk simpanan (*liability based product*) seperti giro, deposito dan tabungan.
- 2) Produk asset (*asset based product*) seperti pembiayaan.
- 3) Produk jasa – jasa (*service based product*) seperti pengiriman uang, *saved deposit box*, bank garansi, *letter of credit* dan sebagainya.

Saat ini telah berkembang juga jasa pengelolaan kekayaan (*wealth management*) bagi nasabah – nasabah yang mempunyai simpanan dalam jumlah besar di bank yang bersangkutan. Jasa pengelolaan kekayaan nasabah ini pada dasarnya merupakan pengembangan jasa bank dan bersifat eksklusif, dikenal juga dengan nama jasa *private banking*, *personal banking*, nasabah prima dan sebagainya.

Dari kegiatan usaha tersebut lembaga keuangan syariah mendapatkan penghasilan berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee* (*ujrah*), dan pungutan lainnya seperti biaya administrasi. Namun pendapatan dari lembaga keuangan syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/margin/*fee*). Imbalan tersebut diperoleh lembaga keuangan syariah dari kegiatan usaha berupa

pembiayaan. Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu jenis dari kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud sebagai pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.³²

³² Lusriadi, *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah*, hal. 30-31.

b. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya *restrukturisasi* pembiayaan sebagai berikut:

QS. Al – Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.³³

c. Jenis – Jenis Pembiayaan

Jenis – jenis pembiayaan yang ada di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu:

1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,, hal. 48.

a) Pembiayaan Konsumtif

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.

b) Pembiayaan Produktif

Adalah pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.

c) Pembiayaan Perdagangan

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

2) Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktunya (*short term financing*)

a) Pembiayaan jangka pendek

Adalah pembiayaan yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun.

b) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*)

Adalah pembiayaan yang berjangka waktu satu hingga 3 tahun.

c) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*)

Adalah pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun.

3) Pembiayaan dilihat dari penggunaannya

a) Pembiayaan modal kerja

Adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran

kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi dan sebagainya.

b) Pembiayaan investasi

Adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang – barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.

c) Pembiayaan multi guna

Adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya.³⁴

d. Kode Etik Pelaksanaan Pembiayaan

Untuk memantapkan *performance* kerjanya pejabat bank syariah sebagai suatu profesi perlu menjunjung tinggi kode etik pejabat pembiayaan bank syariah sebagai berikut:

- 1) Patuh dan taat kepada ketentuan perundang – undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku baik ekstern maupun intern.

³⁴ Yusak Laksmiana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hal. 38-40.

- 2) Melakukan pencatatan setiap kegiatan transaksi yang terjaln dengan kegiatan bank.
- 3) Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- 5) Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang bertentangan.
- 6) Menjaga kerahasiaan nasabah dan bank.
- 7) Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat professional dalam penilaian atau keputusan pembiayaan.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.³⁵

e. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Muhammad dalam bukunya risiko yang yang sering terjadi dari kegiatan pinjam meminjam adalah peminjam yang tertunda dan/atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Menurut Trisadina dalam bukunya

³⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 38-39.

NPF (*Non Performing Finance*) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV) dan macet (golongan V). Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. *Monitoring* aktif adalah mengunjungi nasabah secara *regular*, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau *call report* kepada komite pembiayaan atau supervisor. Sedangkan *monitoring* pasif adalah *monitoring* pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan.³⁶

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak pernah dijumpai sekalipun pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financing (NPF)* untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan (NPL)* untuk fasilitas kredit tidak pernah dijumpai dalam peraturan – peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing (NPF)* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

³⁶ Ngamilatul Marzuqoh, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali*, Tugas Akhir IAIN Salatiga, hal. 20-21.

Pembiayaan tersebut dari segi produktifitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.³⁷

f. Kriteria Pinjaman Bermasalah

1) Kurang Lancar

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d) Terjadi pelanggaran kontrak yang telah diperjanjikan.

³⁷ Lusriadi, *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah*, hal. 35.

e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi peminjam.

f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.³⁸

2) Diragukan

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

d) Terjadi kapitalisasi bunga.

e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pinjaman maupun pengikatan jaminan.

3) Macet

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 270 hari.

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

c) Dari segi hukum, maupun segi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³⁹

Penilaian kualitas pinjaman juga diatur dalam Peraturan BI atau PBI 7/2005, Pasal 12 ayat 3 yaitu (a) lancar, (b) dalam perhatian khusus, (c) kurang lancar, (d) diragukan atau (e) macet. Penilaian kualitas pinjaman khusus untuk debitur kecil sesuai dengan Pasal 35

³⁸ Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Corporate Governance)*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), hal. 115-116.

³⁹ Ibid., hal. 116.

hanya didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran pokok utang dan bunga. Ketentuan Pasal 35 tersebut kemudian diperbaharui oleh Pasal 35 dari PBI 9/2007 yang antara lain menaikkan plafon pinjaman. UMKM khususnya usaha menengah hingga maksimal Rp 20 milyar bagi bank yang mempunyai tingkat pengendalian risiko dengan predikat sangat memadai dan maksimal Rp 10 milyar bagi bank yang mempunyai predikat dapat diandalkan. Penilaian kualitas pinjaman atas dasar ketepatan pembayaran pokok dan bunga juga diterapkan terhadap debitur kecil dan menengah.⁴⁰

g. Faktor – faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu:

- 1) Faktor Internal (Dari Pihak Bank)
 - b) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - c) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - d) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
 - e) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
 - f) Proyeksi penjualan terlalu optimis.

⁴⁰ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hal. 37.

- g) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
- h) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- i) Lemahnya *supervise* dan *monitoring*.
- j) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.⁴¹

2) Faktor Eksternal (Dari Pihak Luar)

- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- b) Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
- c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dengan persaingan usaha.
- d) Usaha yang dijalankan relative baru.
- e) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- f) Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.
- g) Meninggalnya *key person*.
- h) Perselisihan sesama direksi.
- i) Terjadinya bencana alam.

⁴¹ Casmuti, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad*, hal. 37-38.

j) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau sektor industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh terhadap:

1. Kolektifitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR dan tingkat kesehatan bank maupun lembaga keuangan non bank semakin turun.
5. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
6. Dari aspek moral, bank maupun lembaga keuangan non bank telah bertindak hati – hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.⁴²

⁴² Casmuti, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah*....., hal. 38-40.

h. Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

1) Pemilihan nasabah yang tepat

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S yaitu:

a) Character

Adalah penilaian terhadap karakter atau kepribadian seseorang atau calon nasabah dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa calon nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya.

b) Capacity

Adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat – alat, pabrik serta metode kegiatan.

c) Capital

Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio financial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) *Collateral*

Adalah jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Penilaian ini dilakukan bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e) *Condition of economy*

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah non bank harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f) *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar – benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan Fatwa DSN “*Pengelola*

tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”⁴³

2) Pembinaan nasabah

a) Pengawasan nasabah setelah pencairan

Misalnya melakukan pengecekan terhadap dana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah apakah benar – benar digunakan sesuai dengan perjanjian atau tidak, caranya yaitu lembaga keuangan syariah meminta tanda bukti dari hasil pembelian barang dan dana tersebut benar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan mikro syariah.

b) Pengawasan terhadap usaha

Dengan cara dipantau dan dikunjungi untuk melihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya.

c) Pengawasan terhadap jaminan

Lembaga keuangan syariah melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk meminjam dana, apakah jaminan tersebut benar – benar ada

⁴³ Ngamilatul Marzuqoh, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam.....*, hal. 28-29.

sesuai dengan bukti yang tertulis yang diserahkan kepada lembaga keuangan mikro syariah.⁴⁴

i. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah – langkah yang dilakukan di Koperasi Syariah dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban – kewajiban lainnya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kembali.

Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka koperasi syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring*, yaitu dengan cara *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah Koperasi Syariah berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum islam dan ketentuan – ketentuan Fatwa DSN – MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang bahwa *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Adapun upaya untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan macet antara lain:

⁴⁴ Ngamilatul Marzuqoh, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam.....*, hal. 29-30.

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Adalah penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang diberikan yaitu:

- a) Memperpanjang jangka waktu pembayaran.
- b) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula yang angsurannya ditetapkan selama 3 bulan kemudian dirubah menjadi 6 bulan.
- c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu angsuran.⁴⁵

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok pinjaman nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan, antara lain:

- a) Pengurangan jadwal pembayaran.
- b) Perubahan jumlah angsuran.
- c) Perubahan jangka waktu.
- d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*.
- e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, dan/atau

⁴⁵ Casmuti, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah*....., hal. 41-42.

f) Pemberian potongan.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap nasabah yang kesulitan pembayaran, yaitu:

- a) Penambahan dana dari fasilitas pembiayaan.
- b) Konversi akad pembiayaan.
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka.
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.⁴⁶

Selain dengan cara – cara di atas ada cara lain yang bisa dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yakni melalui penyelesaian oleh lembaga keuangan sendiri, adapun tahapannya yaitu:

a) Tahap pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank dan lembaga non bank itu sendiri secara *persuasif*, musyawarah dan mediasi melalui pihak ketiga dengan kemungkinan:

⁴⁶ Casmuti, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah*....., hal. 42-43.

- (1) Nasabah mau melunasi atau mengangsur kewajiban pinjaman.
- (2) Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- (3) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi).
- (4) Dilaksanakan penagihan utang (pembaharuan utang atau *novasi subjektif*).
- (5) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, pemberi dan pemegang hak jaminan fidusia atau hak tanggungan, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

b) Tahap kedua

Apabil tahap pertama tidak berhasil, bank maupun lembaga non bank melakukan upaya – upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan *psikologis* kepada debitur berupa peringatan tertulis (*somasi*) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, *somasi* tersebut dilakukan oleh bank ataupun lembaga non bank dengan berpedoman pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata yang menegaskan

bahwa debitur lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai atau debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam perjanjiannya sendiri.

c) Tahap ketiga

Dalam hal upaya – upaya tahap kedua belum berhasil, bank dan lembaga non bank dapat menempuh tahap ketiga yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik agunan. Dalam praktiknya walaupun telah ada surat kuasa notaril dari debitur, namun tidak semua bank dan lembaga non bank lainnya berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah salah satu referensi penting bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga penulis mampu memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan pengkajian dan penelitian. Dari banyaknya penelitian terdahulu yang ada peneliti tidak satupun menemukan kesamaan judul yang diambil. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian

⁴⁷ Bunga Novita Sari, *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*, Skripsi Minor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, hal. 16.

penulis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lusriadi⁴⁸ dalam tulisannya yang berjudul *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah Di BNI Syariah Kantor Cabang Depok* yang memaparkan hasil berupa manajemen *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok selalu berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan, ketika nasabah memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin dari 31 sampai dengan 60 hari, maka nasabah perlu mengajukan *restrukturisasi*. Kejadian ini seringkali terjadi pada nasabah yang baru saja terkena PHK ataupun pindah profesi. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pertama, dilakukan di lembaga keuangan syariah berupa bank sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah di koperasi. Kedua, metode untuk melakukan *restrukturisasi* mengharuskan nasabah untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu sedangkan di koperasi caranya lebih fleksibel melalui musyawarah. Adapun persamaannya adalah memiliki jangka waktu tunggakan yang sama sebelum *restrukturisasi* dilakukan.

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Hayati⁴⁹ dengan judul *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya)*. Penelitian menghasilkan kesimpulan berupa *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah* dilakukan dengan mengidentifikasi pembiayaan bermasalah yang terdaftar dalam data bulanan. Data pembiayaan yang bermasalah dikendalikan dengan upaya –

⁴⁸ Lusriadi, *Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Depok*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hal.

⁴⁹ Ismatul Hayati, *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, hal. 66-76.

upaya penagihan via telepon, kunjungan langsung ke lokasi nasabah, memberikan arahan solusi dan memberikan surat pemberitahuan. Adapun persamaannya dengan penelitian saya adalah memiliki pola penanganan pembiayaan bermasalah yang sama dengan melakukan berbagai tahap sebelum diadakannya *restrukturisasi*. Sedangkan untuk perbedaannya adalah jumlah tunggakan di koperasi di koperasi jauh lebih sedikit ketimbang di bank, hal ini dikarenakan nominal pinjaman di koperasi terbilang cukup rendah.

Untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Sari⁵⁰ dengan judul Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Penelitian ini memperoleh hasil berupa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal disebabkan oleh kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri, salah satu yang menjadi faktor internal yang mendasar adalah kurang cakupannya para analis pembiayaan dalam melihat prospek bisnis atau usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehati – hatian dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan dari faktor eksternal disebabkan oleh faktor dari luar perusahaan meliputi penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur dan debitur mengalami musibah. Cara untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan menerapkan prinsip kehati – hatian

⁵⁰ Bunga Novita Sari, *Strategi Dalam Menangani Pembiayaan*, hal. 25-28.

dalam memberikan pembiayaan seperti menghindari sikap subjektif, harus diadakannya survey kepada calon nasabah dan mengikuti prosedur pembiayaan. Adapun persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah terjadinya pembiayaan bermasalah seringkali disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi dari mitra bisnis (debitur). Sedangkan untuk perbedaannya adalah suku bunga kredit tidak berlaku di koperasi.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Usanti⁵¹ yang berjudul *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah* pada tahun 2006. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bilamana upaya *restrukturisasi* yang dilakukan bank syariah tidak dapat memulihkan kembali pembiayaan pada kategori lancar maka ada beberapa alternative yang dilakukan oleh bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yakni penyelesaian lewat jaminan, penyelesaian lewat Basyarnas, penyelesaian lewat litigasi, hapus buku dan hapus tagih. Dari hasil yang dipaparkan oleh peneliti ternyata memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni penyelesaian pembiayaan bermasalah di semua lembaga keuangan syaria baik itu mikro maupun makro dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional apabila pembiayaan tersebut memang sudah tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan *restrukturisasi*. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di perbankan syariah sedangkan peneliti hanya di lembaga keuangan mikro syariah.

⁵¹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah*, Jurnal PERSPEKTIF Vol. IX No. 3, 2006 Edisi Juli, hal. 258-278.

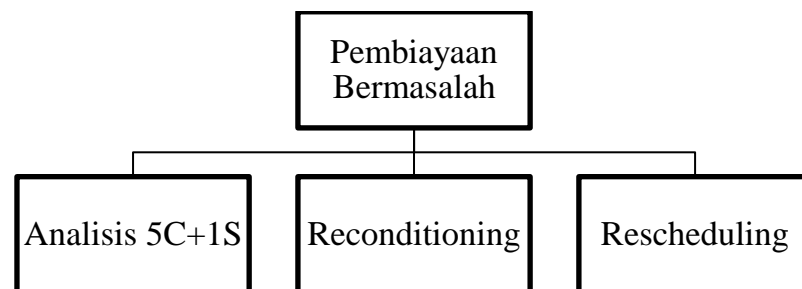
Penelitian kelima yang dilakukan oleh Novrilanimisy dkk⁵² pada jurnal yang berjudul *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*, yang mendapatkan hasil berupa Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang tata cara penyelamatan kredit melalui *restrukturisasi* kredit yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Adapun beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet berdasarkan peraturan tersebut adalah: 1) Penurunan suku bunga kredit, 2) Perpanjangan jangka waktu kredit, 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit, 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit, 5) Penambahan fasilitas kredit dan/atau, 6) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Dari hasil yang telah dipaparkan di atas maka perbedaannya adalah jenis lembaganya dimana penelitian tersebut menggunakan lembaga keuangan konvensional selain itu aturan yang dipakai sangatlah mutlak dari Peraturan Bank Indonesia, sedangkan untuk di lembaga keuangan syariah memiliki acuan lain dalam menyelesaikan suatu masalah yakni DSN MUI, ataupun Al – Quran dan Hadits. Adapun untuk persamaannya adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah sama – sama menggunakan perpanjangan jangka waktu.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu terdapat kesamaan dalam fokus penelitian yaitu sama – sama meneliti tentang *restrukturisasi* pembiayaan namun pembahasannya berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa

⁵² Novrilanimisy, dkk, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*, USU LAW JOURNAL, Vol. 2 No. 3, Desember 2014, hal. 135-144.

sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang studi komparatif kebijakan pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

C. Kerangka Berpikir



Dalam mengatasi masalah pembiayaan macet atau bermasalah hendaknya setiap lembaga keuangan khususnya koperasi syariah harus menerapkan beberapa langkah yang pertama adalah upaya preventif yakni berupa pelaksanaan analisis pembiayaan 5C+1S guna meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah, dan langkah yang selanjutnya berupa upaya represif yakni dengan melaksanakan kebijakan *reconditioning* dan *rescheduling* untuk memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan memperbaharui akad atau perjanjian sesuai dengan kemampuan dari anggota.

Upaya yang dilakukan oleh KSPPS BTM Surya Madinah dalam menangani pembiayaan bermasalah ini dilakukan dengan melakukan musyawarah dahulu dengan anggota yang bersangkutan guna mengetahui keadaan yang sedang dialami oleh anggota tersebut sehingga bisa ditemukan

solusi yang tepat. Tindakan ini juga sama dengan yang dilakukan di BMT Pahlawan Tulungagung yang juga mengutamakan kesejahteraan bersama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pihak lembaga selalu menghendaki setiap tindakan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan kemitraannya.